TERIMA KUNJUNGAN DUKCAPIL KABUPATEN KUPANG, INI PESAN KEPALA OMBUDSMAN PERWAKILAN NTT

Senin, 12 September 2022 - Veronica Rofiana Edon

KUPANG, VICTORYNEWS - Ombusmand RI Perwakilan NTT menerima kunjungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapi) Kabupaten Kupang.

Kunjungan Dukcapil Kabupaten Kupang ini diterima Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton di ruang kerjanya.

Kunjungan ini antara lain dalam rangka memenuhi keinginan kuat Dinas Dukcapil Kabupaten Kupang untuk menyiapkan standar pelayanan publik guna kemudahan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton mengatakan tahun ini, laporan masyarakat terkait layanan Dinas Dukcapil Kabupaten Kupang sangat minim.

Menurut Darius, hal ini dimungkinkan karena pelayanan yang diberikan sudah memenuhi standar.

"Bisa saja ini terjadi karena pelayanan dinas dukcapil sudah bagus sehingga tidak perlu dikomplain," ujar Darius kepada victorynews.id, Senin (12/9/2022).

Untuk itu, Darius menyampaikan terima kasih atas kerja Dukcapil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kupang.

Darius menyebut, khusus pemerintah daerah, ada lima dinas yang akan dinilai yaitu Dinas Kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, dinas dukcapil dan dinas penanaman modal dan PTSP serta dua puskesmas dalam kota.

Sedangkan, instansi vertikal yang dinilai adalah Polres dan kantor pertanahan/BPN. Dengan demikian ada 9 unit layanan di masing-masing kabupaten akan dikunjungan tim ombudsman dalam penilaian tahun ini.

Tim Ombudsman akan mengunjungi langsung 201 unit layanan kementrian maupun lembaga dan pemerintah daerah di seluruh NTT mulai dari Kabupaten Manggarai Barat tanggal 21 Agustus 2022 dan berakhir di Kabupaten Malaka pada tanggal 12 November 2022.

Sebelum penilaian ini, kata Darius, telah dilakukan workshop pendampingan dan telah ada komunikasi masing-masing tim ke narahubung 9 instansi yang akan dinilai.

"Kami berharap penilaian pelayanan publik di semua kabupaten ini berlangsung lancar tentu atas dukungan masing-masing pemda dan institusi Polri dan BPN," kata Darius. ***